

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Pada awal perkembangannya, para sarjana Hubungan Internasional berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Seperti yang dikutip pendapat dari Schwarzenberger yang menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*Sociology of International Relations*). Dipihak lain, terdapat sarjana ilmu Hubungan Internasional dengan menekankan pada aspek politik dari hubungan antar negara, yang dapat dipelajari melalui politik luar negeri negara- negara yang bersangkutan.

Mc.Clelland mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai berikut:

“Studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi-interaksi.”  
(Mc.Clelland, 1986:27)

Pada tahun 1920-an sampai 1930-an, studi Hubungan Internasional berjalan menurut tiga jalur, yaitu:

1. Hubungan Internasional dipelajari melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang jadi berita utama dan dari bahan itu dicoba dibuat semacam pola umum kejadian.
2. Hubungan Internasional dipelajari melalui studi tentang Organisasi Internasional.
3. Hubungan Internasional adalah model analisa yang menekankan Ekonomi Internasional (Mas' oed, 1990:15).

Pada dekade 1980-an studi Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat didunia, juga merupakan studi tentang actor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bangsa-bangsa. Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi.

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an telah merubah pula sistem internasional dari bipolar menjadi multipolar. Pasca perang dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu high politics (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu low politics (hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu high politics (Kegley dan Wittkopf, 1997:4-6).

Voitti dan Kauppi berpendapat bahwa:

“Hubungan Internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya diantara aktor-aktor negara dan aktor- aktor non negara. Hubungan

internasional juga mengkaji tentang politik internasional; politik dunia (*world politics*) dan politik internasional memiliki arti yang sama.” (Viotti dan Kauppi, 1993:585)

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Mochtar Mas' oed, 1994:28)

Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatkan peranan aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak dihiraukan.

Stanley Hoffman memandang perubahan-perubahan yang terjadi dalam Hubungan Internasional meliputi lima bagian utama, yaitu: aktor (pelaku Hubungan Internasional); tujuan para aktor; power; hirarki interaksi dan sistem internasional itu sendiri. Hoffman menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara. Selain negara ada juga pelaku internasional, transnasional, atau supranasional yang lain seperti *United Nation* (Perserikatan Bangsa-Bangsa), *Europe Nation* (Uni Eropa), MNC (*Multi*

*National Corporation*), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGOs (*Inter-Governmental Organization*), INGOs (*Inter Non-Governmental Organization*) dan sebagainya.

Dalam interaksi yang membentuk hubungan internasional, faktor ekonomi menjadi sangat penting dalam menentukan proses politik, dan sebaliknya, pemahaman bahwa terdapat jalinan yang saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan antara faktor ekonomi dan politik, serta negara dengan pasar semakin diakui (Jackson dan Sorensen, 1999; 177).

Dipihak lain, terdapat sarjana ilmu Hubungan Internasional dengan menekankan pada aspek politik dari hubungan antar negara, yang dapat dipelajari melalui politik luar negeri negara- negara yang bersangkutan. Hubungan internasional lahir secara resmi setelah masa Perang Dunia I dengan tujuan mengatakan bahwa dunia setelah berakhirnya perang yang dapat menimbulkan banyak korban di berbagai dunia dapat berhenti. Selain itu, tujuan lainnya yakni memastikan interaksi diantara negara dapat berjalan dengan damai. Oleh karena itu, hubungan internasional secara nyata mempelajari interaksi diantara negara – negara bahkan dengan aktor non negara. Bahkan dinamika interaksinya meliputi berbagai kepentingan lainnya seperti kebudayaan, teknologi, ekonomi, dsb (Darmayadi, 2015:51-52).

Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan menyebabkan studi hubungan internasional menjadi semakin kompleks. Kompleksitas

hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack C. Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (1999: 115).

### **2.1.2 Paradigma Pluralis (Pluralism)**

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Namun, pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi adapula aktor-aktor selain negara, hal ini dikemukakan oleh paradigma pluralisme. Dalam konteks ini, paradigma pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dimana Hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor non negara termasuk pula didalamnya societal.

Pluralisme merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi paradig puralis adalah:

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintah, MNCs, kelompok ataupun individu.

2. Negara bukanlah unitary actor/ aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.
3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada power atau national security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain.( Viotti dan Kauppi, 1990:215)

### **2.1.3 Organisasi Internasional**

Menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama.

Didalam konsep Organisasi Internasional selalu diawali dengan pertanyaan *Why, What, How*. Pertanyaan ini mencakup mengenai mengapa Organisasi Internasional itu dibutuhkan, Achievement apa yang ingin diwujudkan, dan bagaimana sasaran Organisasi tersebut dapat tercapai (Triwahyuni, 2010)

Organisasi internasional lahir dari kebutuhan akan kerja sama. Seiring dengan perkembangan sosial, ketergantungan dengan yang lain semakin meningkat, hal ini berlaku dalam masyarakat domestik dan juga masyarakat internasional. Masalah umum yang membutuhkan tindakan bersama ini pertama kali dirasakan di bidang non-politik.

Awalnya organisasi internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kerjasama selama revolusi industri. Adapun jenis Organisasi Internasional yaitu :

#### **2.1.3.1 International Governmental Organizations (IGOs)**

Organisasi antarpemerintah atau IGOs terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Ada lebih dari 300 organisasi antar pemerintah di seluruh dunia. Organisasi antarpemerintah terdiri dari negara-negara berdaulat. Organisasi antarpemerintah merupakan aspek penting dari hukum internasional.

Salah satunya adalah *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB). PBB dibentuk pada akhir perang dunia II, dengan bertujuan untuk menghindari perang di masa depan. Tujuan utama dari PBB sendiri adalah menjaga perdamaian di seluruh dunia.

#### **2.1.3.2 International Nongovernmental Organizations (INGOs or NGOs)**

Tidak seperti organisasi antar pemerintah, INGOs terdiri dari individu, bukan korporasi atau pemerintahan. INGOs melayani berbagai fungsi dan mewakili berbagai kepentingan. Aktor non pemerintah adalah organisasi yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah tapi memainkan peran penting dalam politik internasional.

#### **2.1.4 Teori Peran Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional adalah organisasi yang dibentuk dan dianggotai oleh lebih dari satu Negara dengan dasar kesamaan, tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian dalam hubungan Internasional. Organisasi Internasional bersifat inklusif. Sebelum adanya organisasi internasional, organisasi internasional yang bersifat inklusif hanya dalam bentuk aliansi militer dan organisasi antar negara yang bersifat

eksklusif. Hal ini dinamakan sebagai intergovernmental organization (IGO). Adapun juga aktor-aktor yang bersifat suatu organisasi tetapi tidak dalam bentuk organisasi antar negara seperti Kekaisaran Romawi Suci dan Gereja Katolik. Namun yang diteliti dalam penelitian ini adalah organisasi internasional yang merupakan intergovernmental organization (Barkin, 2006: 5).

Dengan adanya kepentingan negara untuk bergabung dengan organisasi internasional, tentu saja organisasi internasional memiliki berbagai fungsi tertentu yang penting dalam kepentingan luar negeri negara. Salah satunya adalah untuk memfasilitasi pembentukan prinsip, norma dan peraturan tindakan dimana negara anggota harus menyesuaikan kebijakannya dengan prinsip, norma dan peraturan yang dibentuk (Karns dan Mingst, 2004: 9). Organisasi internasional dapat menyesuaikan kebijakan-kebijakan negara anggotanya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini menggambarkan menurut Archer (2001: 79) peran organisasi internasional sebagai aktor dalam hubungan internasional.

Analisis organisasi internasional berlandas terhadap premis dimana bisa mempelajari bagaimana organisasi internasional itu berfungsi sebagaimana organisasi internasional itu dibentuk di dalam kurun waktu kapan pun (Barkin, 2006:32). Ini merupakan titik awal yang baik untuk menganalisis organisasi internasional tetapi ini tidak menggambarkan bagaimana organisasi internasional itu akan berubah masa ke masa.

Untuk mengatasi hal ini, fungsionalisme muncul seiring perkembangan organisasi internasional yang semakin berpengaruh. Para fungsionalis melihat ini

sebagai dorongan dalam proses perkembangan organisasi internasional dimana ada beberapa area yang perlu adanya pemerintahan internasional yang bisa mengatasi permintaan yang baru (Barkin, 2006:32).

Dalam buku karangan Clive Archer yang berjudul *International Organization* menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori, yaitu (Yama,2014):

#### 1. Sebagai Instrumen

Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. OI digunakan oleh anggota-anggotanya dalam tujuan tertentu dan biasanya terjadi pada IGO (*Intergovernmental Organization*). Peranan OI sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang dapat mendukung kepentingan nasional suatu negara. Menurut Clive Archer juga, sebagai instrumen OI digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai intensitas konflik dan juga menyelaraskan tindakan. Dengan menyelaraskan tindakan sesuai OI maka suatu negara telah menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa kinerjanya sesuai dengan OI yang berlandaskan atas kesamaan tujuan. Dalam mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara, organisasi penting bagi kepentingan suatu negara dalam mendukung keuntungan jangka panjang bagi pemerintah nasional.

#### 2. Sebagai Arena

Organisasi internasional merupakan tempat bagi anggota- anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang

organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian inter-nasional. Berdasarkan peran OI sebagai arena atau forum, organisasi internasional menyediakan wadah bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama dalam berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, organisasi internasional digunakan oleh suatu negara sebagai tempat ber-konsultasi maupun memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional.

### 3. Sebagai Aktor Independen

Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sedangkan dalam peran OI sebagai aktor independen, keindependenan diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar organisasi. Dalam hal ini, organisasi internasional melakukan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan program yang mereka bentuk tanpa dipengaruhi dari kepentingan luar organisasi.

Sebagai pengertian dan definisi tersebut *UN Women* merupakan organisasi non-pemerintah internasional (NGO/INGO) yang memiliki anggota dari berbagai negara di dunia yang terdiri dari individu, masyarakat maupun kelompok swasta atau disebut dengan hubungan transnasionalnya. Sebagai sebuah organisasi non-pemerintah internasional, UN Women memiliki visi dan misi yang jelas, di mana

da-lam penelitian ini UN Women memiliki tujuan untuk mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan.

### **2.1.5 Kampanye**

Kampanye dimaksudkan untuk menghasilkan output yang spesifik terhadap jumlah individu yang relatif besar, dalam kurun waktu tertentu dan melalui kegiatan komunikasi yang teroganisir (Littlejohn & Foss, 2009: 87). Menurut Windahl, Signitzer dan Olsen (1992, 132) kampanye memiliki 4 elemen kunci yakni:

1. Memiliki tujuan;
2. Ditunjukkan pada audiens yang luas;
3. Kampanye terjadi pada kurun waktu tertentu;
4. Kampanye sendiri melibatkan beberapa set kegiatan komunikasi.

Dalam tahap planning, tahap ini terdiri dari 2 fase yaitu *preproduction phase* dan *production phase*. Dalam tahap *preproduction*, tahap ini dapat dijelaskan bagaimana audiensi bisa disegemntasi agar pesan dari kampanye bisa disesuaikan dengan demografi, geografi dan keadaan psikogeografi audiens. Dalam tahap *production phase*, konsep-konsep yang dibahas dalam *preproduction phase* dapat dievaluasi kembali untuk kampanye yang lebih besar. Tahap berikutnya yaitu *implementation* membahas mengenai bagaimana kampanye tersebut dapat disampaikan kepada audiens tertentu. Pesan dari kampanye harus dapat berkesan, berkualitas tinggi dan di salurkan melalui media yang disesuaikan dengan audiens nya. Tahap terakhir yaitu *evaluation* terdiri dari 2 evaluasi yaitu *process evaluation* dan *summative evaluation*. Perbedaan antara dua hal ini adalah pada *process evaluation*,

evaluasi ini dilaksanakan pada fase implementasi kampanye. Ini untuk memastikan semua unsur di dalam kampanye dapat tersalurkan. Pada *summative evaluation*, evaluasi ini dilakukan pada akhir kampanye untuk melihat efektivitas kampanye tersebut. Meskipun demikian, proses evaluasi ini terkadang tidak terlaksanakan meskipun dapat menjelaskan evaluasi mengenai efek dari kampanye tersebut (Littlejohn & Foss, 2009: 89).

Kampanye *HeForShe* merupakan salah satu bentuk kampanye yang diinisiasikan oleh *UN Women*. Kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran laki-laki dalam perlibatannya untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender. Gerakan kampanye merupakan ide dari pemikiran Elizabeth Nyamayaro, seseorang penasehat senior untuk direktur *UN Women*. Kampanye tersebut dimulai pada saat pidatonya pada tahun 2014 oleh aktris terkenal Emma Watson yang menekankan terhadap pentingnya penghapusan ketidaksetaraan gender dan perlibatan laki-laki dalam proses tersebut. Pada awalnya gerakan tersebut ditunjukkan untuk level individu tetapi dengan seiring waktu kepala-kepala negara, direktur perusahaan dan beberapa universitas pun mengikuti sebagai pelopor gerakan *HeForShe*. Salah satu kepala negara yang menjadi duta dalam kampanye *HeForShe* adalah Presiden Joko Widodo. Dengan memaparkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu duta gerakan *HeForShe*, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap realisasi gerakan *HeForShe*. Banyak insisiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk merealisasikan ini, salah satunya adalah dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

### **2.1.5 Feminisme**

Feminisme berasal dari bahasa Latin, *femina* atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan.<sup>26</sup> Sekarang ini banyak yang mendefinisikannya sebagai perbedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Feminisme merupakan paham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut. Posisi perempuan selama ini di masyarakat selalu berada di bawah atau di belakang laki-laki. Posisi yang sangat tidak menguntungkan.

Feminisme dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

#### **2.1.5.1 Feminisme Liberal**

Feminisme jenis ini menganut dasar paham liberalism, dengan menitik beratkan pada aspek kebebasan. Dalam feminisme liberal, muncul pemikiran yang menekankan bahwa keseluruhan manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sama, seimbang, setara, dan tidak semestinya mendapatkan suatu penindasan. Tokoh utama yang berperan penting dalam gerakan feminisme liberal ini adalah Mary Wollstonecraft dengan karyanya yang berjudul *Vindication of Right of Woman*.

Dalam karya *Vindication of Right of Woman*, Mary Wollstonecraft mengemukakan bahwa pria dan wanita, keduanya mempunyai pola pemikiran yang sama, sehingga sudah seharusnya keduanya mendapatkan persamaan hak dan perlakuan. Dilihat

dari sudut pandang sejarah, gerakan feminisme liberal ini berfokus pada perjuangan kaum perempuan dalam mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki.

#### **2.1.5.2 Feminisme Marxis Komunis**

Kemunculan Feminisme Marxis didorong oleh anggapan mengenai ketertinggalan kaum perempuan yang disebabkan karena paham kapitalisme yang berkembang luas dalam penyelenggaraan sebuah negara. Dasar kapitalisme adalah adanya paham yang menyatakan kebebasan individu dalam memperkaya dirinya dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin.

Dalam Feminisme Marxisme ini, memandang keberadaan kapitalisme sebagai ketidakadilan bagi perempuan, dengan beragam kerugian yang akan ditanggung. Selain itu, munculnya anggapan bahwa laki laki akan dominan dalam mengontrol program- program pelaksanaan produksi sehingga mereka akan memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi. Feminisme Marxisme bertujuan dalam upaya keras dalam menghapuskan sistem dalam arti kapitalisme.

#### **2.1.5.3 Feminisme Sosialis**

Kemunculan Feminisme Sosialis didorong adanya kritikan terhadap feminisme marxis. Kaum Feminisme Sosialis memandang kapitalisme bukanlah pokok permasalahan dari rendahnya kedudukan kaum perempuan sedangkan kedudukan kaum perempuan sudah dianggap lebih rendah sebelum kemunculan kapitalisme.

Fokus utama dalam kajian feminisme sosialis adalah untuk mengapuskan sistem kepemilikan dalam suatu tatanan sosial.

#### **2.1.5.4 Feminisme Radikal**

Feminisme Radikal muncul sekitar pertengahan abad ke 19, dengan berfokus pada sekumpulan ide dan pemikiran mengenai perjuangan yang memisahkan hak-hak perempuan, serta penuntutan kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam tatanan sosial.

Feminisme radikal ini lebih menitik beratkan tujuan dalam memperjuangkan hak perempuan, yang ditinjau dari perspektif biologis atau naluriah dimiliki perempuan sebagai hak kodrati.

#### **2.1.5.5 Feminisme Anarkis**

Feminisme anarkis merupakan salah satu jenis paham feminisme yang tergolong ekstrim. Feminisme anarkis memandang laki-laki dan negara sebagai sumber utama dalam memicu segala permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan.

Sehingga tujuan dari feminisme anarkis adalah untuk menghancurkan laki-laki serta negara, kemudian menjadikan perempuan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam tatanan sosial.

#### **2.1.5.6 Feminisme Post Modern**

Feminisme Post modern merupakan jenis feminisme yang berkembang dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Feminisme post modern merupakan

perkembangan dari gerakan feminisme yang menolak pandangan maupun pemikiran yang bersifat mutlak dan kekuasaan dominan. Feminisme Post modern berfokus dalam menjadikan kaum perempuan sebagai feminis yang bebas serta berpikiran dan berpandangan luas, sesuai dengan keinginan masing- masing.

### **2.1.6 Teori Feminisme dalam Kebijakan Luar Negeri**

penerapan kebijakan feminisme yakni pemenuhan terhadap HAM mengharuskan negara ini untuk menerapkan kebijakannya diluar daripada teritori wilayahnya. Pertama, dalam asas pemenuhan terhadap HAM, Swedia telah melakukan upaya seperti upaya diplomasi dalam *UN General Assembly* dan *UN Human Rights Council* dalam upaya peningkatan kesadaran terhadap kesetaraan gender dalam aspek internasional. Swedia juga telah mendorong *UN Human rights Council* untuk melakukan upaya dalam inklusi dan perbaikan kesehatan reproduksi dan seksual serta pemberantasan pernikahan anak dan mendorong UN Human Rights Council untuk mengadopsi resolusi perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Dikutip dari tulisan berjudul *Introducing Feminism in Internasional Relations Theory*, Sarah Smith mengatakan:

*“If we start with feminism’s first contribution – making women visible – an early contribution of feminist theorists is revealing that women were and are routinely exposed to gendered violence. In making violence against women visible, an*

*international system that tacitly accepted a large amount of violence against women as a normal state of affairs was also exposed.” (Smith, 2018).*

Pengertian feminisme masih banyak disalahartikan, meskipun telah menjadi suatu istilah yang familier dalam kehidupan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang memahami feminisme sebagai sebuah pandangan anti-maskulin atau superioritas perempuan. Namun awal pendekatan ini muncul dikarenakan keadaan perempuan yang sering mengalami tindak diskriminasi bahkan dalam pemenuhan kebutuhan paling dasar. Para penstudi Hubungan Internasional kemudian menarik pendekatan tersebut menjadi sebuah teori yang juga relevan dalam tata kelola global dan relasi antar negara. Perhatian terhadap kesetaraan gender kemudian meningkat dengan adanya implementasi teori Feminisme dalam kebijakan luar negeri negara seperti, Swedia, Norwegia dan Kanada. Ambisi yang transformatif dari kebijakan luar negeri feminis membutuhkan kepekaan terhadap studi baru, aktor, kebijakan dan kerangka kerja etis dalam Hubungan Internasional. Teori feminis dalam Hubungan Internasional adalah kunci untuk mempelajari kebijakan luar negeri karena menantang ketidakmampuan gender dan tidak adanya perempuan dalam hubungan internasional di banyak bidang, baik dalam teori maupun dalam praktik kebijakan luar negeri dan politik global secara lebih luas. Yang disuarakan oleh semua penelitian feminis adalah ambisi menyeluruh untuk secara kritis membongkar ketidaksetaraan gender dalam tatanan global yang lazim dan menantang hierarki kekuasaan, hak istimewa, dan institusi gender di dalamnya. (Aggestam, Rosamond & Kronsell, 2019).

Dalam tulisannya yang berjudul “*Theorising feminist foreign policy*”, Karin Aggestam, Annika B. Rosamond dan Annica Kronsell mengemukakan kerangka utama dalam implementasi kebijakan luar negeri feminis. Hal tersebut harus dapat mencakup tentang pentingnya perdamaian, keamanan dan keadilan gender untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri feminis mencakup analisis konstruksi stereotip tentang maskulinitas dan feminitas dalam kaitannya dengan situs-situs utama kekuasaan dan kepemimpinan, dekonstruksi biner gender yang hadir dalam perilaku internasional negara, fokus pada perempuan sebagai kategori universal dan memproduksi hubungan yang dipertemukan dalam suatu titik atau konsensus dalam praktik kebijakan luar negeri.

Penelitian ini akan menitikberatkan pada peran UN Women dalam kebijakan luar negeri feminis, sehingga dapat memberikan gambaran utama akan hasil dari relasi tersebut terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

### **2.1.7 Teori Gender**

Kata *gender* dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah

dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.

Istilah gender pertama kali dikenalkan di Amerika pada tahun 1960an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender (Mufidah, 2008).

Secara garis besar, aliran-aliran feminisme terbagi dalam 2 (dua) kluster yaitu kluster yang merubah *nature* (kodrati) perempuan, dan yang melestarikan *nature* perempuan. Kluster merubah *nature* perempuan terdiri atas aliran-aliran Feminisme Eksistensialisme, Feminisme Liberal, Feminisme Sosialis/ Marxis dan Teologi Feminis. Adapun kluster melestarikan *nature* perempuan terdiri atas aliran-aliran Feminisme Radikal dan Ekofeminisme (Megawangi 1999).

Gender merupakan karakteristik kepribadian, seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya dan dikelompokkan menjadi empat klasifikasi, yaitu: maskulin, feminim, androgini dan tak tergolongkan (Bem, 1981).

Oleh karena itu peneliti menggunakan Teori Feminisme Liberal serta Teori Kesetaraan Gender dikarenakan *UN Women* memiliki tujuan untuk mendapatkan kebebasan perempuan dalam dunia, kampanye *heforshe* sebagai kampanye utama penggerakannya. Pemaparan selanjutnya mengenai hal ini, akan peneliti tuangkan dalam bab III.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Komnas Perempuan, mencatat bahwa dalam kurun waktu dua tahun dari 2016 hingga 2017 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama , serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 Provinsi. Data ini turun dari data tahun sebelumnya karena kendala teknis pendokumentasian di Pengadilan Agama dan perubahan struktur di beberapa layanan berbasis Negara.

Permasalahan kesetaraan gender di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Dimulai pada tahun 2015 dimana kasus kekerasan perempuan menjadi tidak asing lagi di mata masyarakat, tercatat terdapat sebanyak 321.752 kasus yang terkonfirmasi di Indonesia, kasus kekerasan seksual pun terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 5.002 kasus dalam kurun waktu satu tahun, dan terdapat 8 kasus pemalsuan akta nikah serta 6 kasus human trafficking di Indonesia.

Terbentuknya UN Women dilatarbelakangi atas tanggapan Sekretaris Jenderal PBB terhadap resolusi Majelis Umum PBB 63/311. Kemudian pada Januari 2006 45 Sekretaris Jenderal mempresentasikan laporan A/64/588 yang berjudul “Proposal Komprehensif Badan Majemuk untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau *Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.*” Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal memutuskan bahwa, dibentuknya sebuah entitas baru (dalam hal ini dimaksud adalah *UN Women*) akan lebih membantu sistem badan-badan PBB lainnya dalam tanggung

jawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan entitas baru harus berusaha untuk mempertajam focus dan dampak dari kegiatan kesetaraan gender dari seluruh system PBB (<http://asiapacific.unwomen.org>).

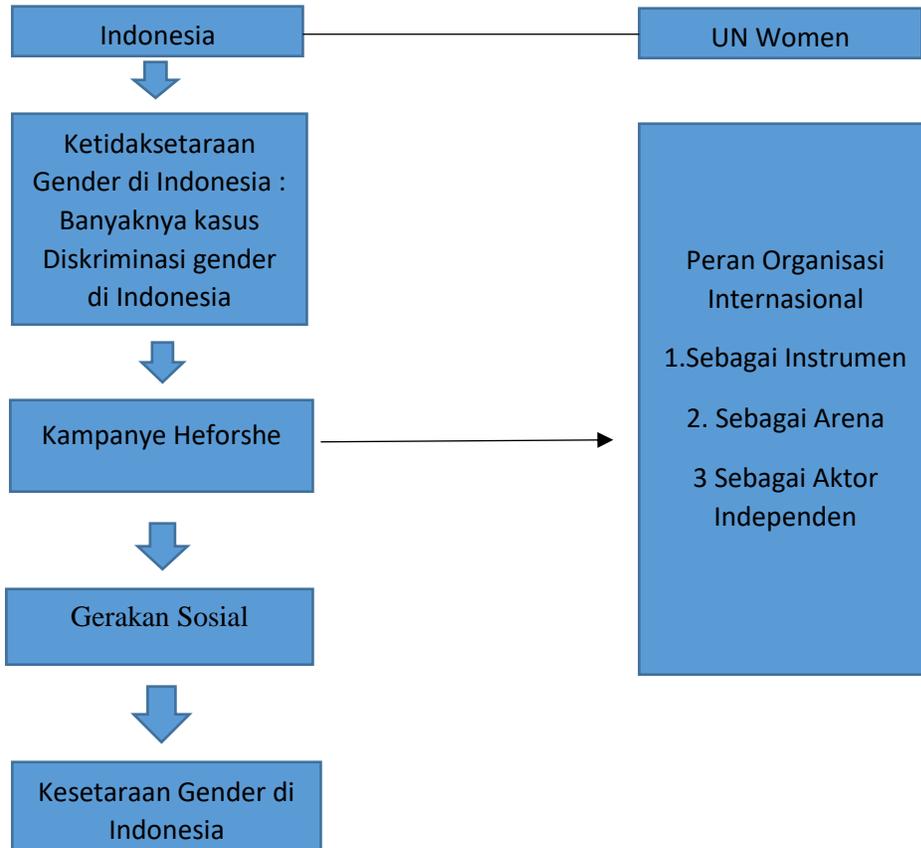
United Nations Women juga tidak hanya ada diberbagai negara-negara yang sering terjadi pelanggaran HAM, United Nations Women juga hadir di Benua Asia terutama di Indonesia dalam membantu menangani serta mengakhiri kasus kekerasan terhadap perempuan. Maka *UN Women (United Nations Women )* organisasi yang resmi bekerja di Indonesia sejak tahun 1992, UN Women telah mendukung Pemerintah Indonesia dan mitra masyarakat sipil untuk menangani prioritas nasional untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di Indonesia pekerjaan *UN Women*, berfokus pada mengakhiri Kekerasan terhadap perempuan.

UN Women memfokuskan programnya pada penguatan implementasi hukum dan uji coba praktik-praktik baik untuk mening-katkan respons dan strategi pencegahan masyarakat. UN Women memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah untuk menghitung biaya layanan bagi perempuan yang selamat dari kekerasan dan mengem-bangkan alat pemantauan dan evaluasi untuk implementasi Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melalui *Pilot Safe Cities*.

UN Women memberikan sa-ran teknis tentang advokasi kebijakan berbasis bukti, cara-cara inovatif untuk meningkatkan respons pemerintah serta strategi pencegahan.



**Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran**



*Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran*